

**Implementasi Undang – Undang Darurat Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Dan Undang –
Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8
Tahun 1948 Terhadap Kasus Kepemilikan Illegal
Senjata Replika Airsoft Gun.**

TESIS

OLEH:

NANANG RUDI SUPRIATNA, SSTMK, SH.



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Terhadap Kasus Kepemilikan Illegal Senjata Replika Airsoft Gun.

Nama Mahasiswa : Nanang Rudi Supriatna

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251006

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian : 2 Juli 2021

Jakarta, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, M.M, M.H.
NIDN. 8847290019

Penguji I : Sabela Gayo, SH., Ph.D.
NIDN. 0307078203

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, SH., M.H.
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

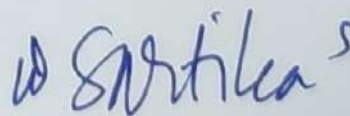
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.
NIDN 0127117401

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H., M.M., M.H.
NIDN 0312117102

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Skripsi : Implementasi Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Terhadap Kasus Kepemilikan Illegal Senjata Replika Airsoft Gun.

Nama Mahasiswa : Nanang Rudi Supriatna

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251006

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian : 2 Juli 2021

Jakarta, 27 Juli 2021

MENYETUJUL,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN 0319046403


Dr. Lukman Hakim S.H., M.H.
NIDN 0319077606

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul *“Implementasi Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Terhadap Kasus Kepemilikan Illegal Senjata Replika Airsoft Gun.”*

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta Juli 2021

Yang membuat pernyataan



NANANG RUDI SUPRIATNA, SSTMK., S.H.
NPM. 201920251006

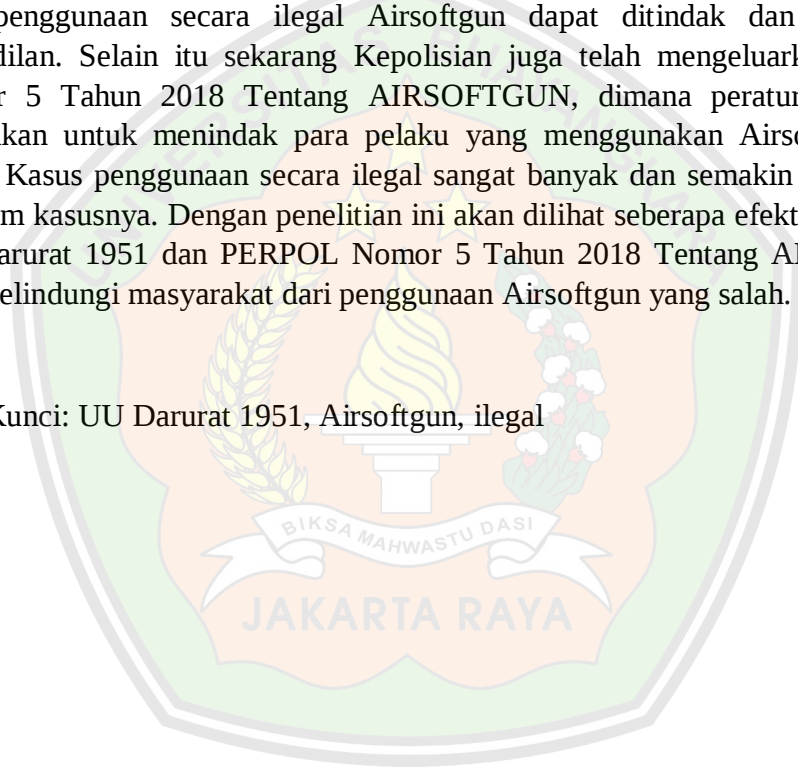
ABSTRAK

NANANG RUDI SUPRIATNA, SSTMK, SH. NPM 201920251006

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 DAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 TERHADAP KASUS KEPEMILIKAN ILLEGAL SENJATA REPLIKA AIRSOFT GUN.”

Penulis dalam tesis ini meneliti mengenai pengenaan Pasal UU Darurat 1951, dimana undang-undang ini sudah lama keluar dan ketika itu belum ada istilah Airsoftgun. Namun Kepolisian tetap membutuhkan landasan hukum yang tetap agar penggunaan secara ilegal Airsoftgun dapat ditindak dan diproses di pengadilan. Selain itu sekarang Kepolisian juga telah mengeluarkan PERPOL Nomor 5 Tahun 2018 Tentang AIRSOFTGUN, dimana peraturan ini dapat digunakan untuk menindak para pelaku yang menggunakan Airsoftgun secara ilegal. Kasus penggunaan secara ilegal sangat banyak dan semakin hari semakin beragam kasusnya. Dengan penelitian ini akan dilihat seberapa efektif keberadaan UU Darurat 1951 dan PERPOL Nomor 5 Tahun 2018 Tentang AIRSOFTGUN bisa melindungi masyarakat dari penggunaan Airsoftgun yang salah.

Kata Kunci: UU Darurat 1951, Airsoftgun, ilegal



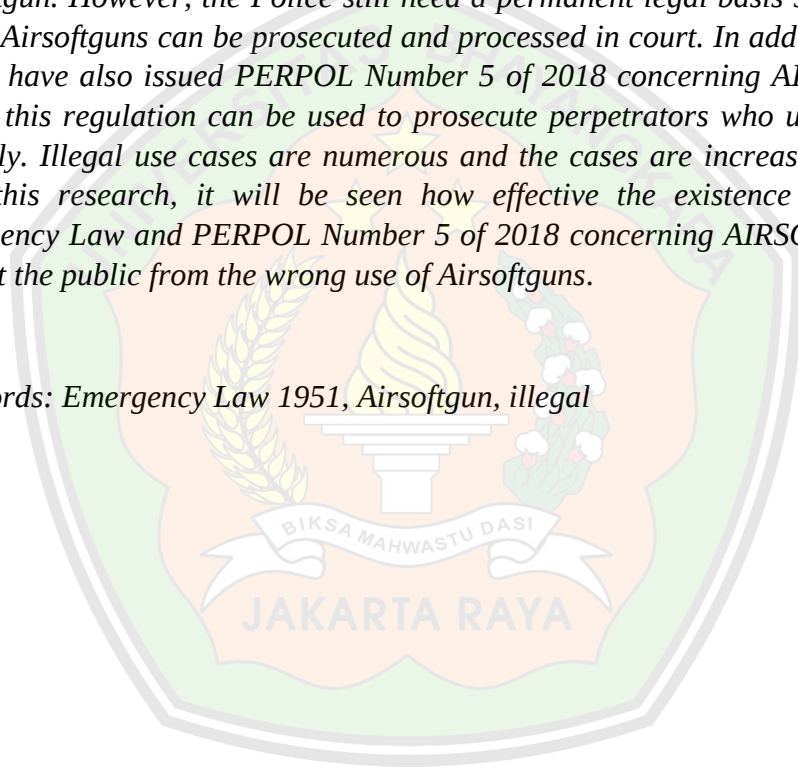
ABSTRACT

NANANG RUDI SUPRIATNA, SSTMK, SH. NPM 201920251006

IMPLEMENTATION OF THE EMERGENCY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 12 OF 1951 AND THE FIRST LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 OF 1948 AGAINST CASES OF ILLEGAL POSSESSION OF AIRSOFT GUN REPLICA WEAPONS

The author of this thesis examines the imposition of the Article of Emergency Law 1951, where this law has long been issued and at that time there was no term Airsoftgun. However, the Police still need a permanent legal basis so that illegal use of Airsoftguns can be prosecuted and processed in court. In addition, now the Police have also issued PERPOL Number 5 of 2018 concerning AIRSOFTGUN, where this regulation can be used to prosecute perpetrators who use Airsoftgun illegally. Illegal use cases are numerous and the cases are increasingly diverse. With this research, it will be seen how effective the existence of the 1951 Emergency Law and PERPOL Number 5 of 2018 concerning AIRSOFTGUN can protect the public from the wrong use of Airsoftguns.

Keywords: Emergency Law 1951, Airsoftgun, illegal



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada ALLAH Subhanahuwata'ala Tuhan YME yang telah memberikan nikmat dan kesempatan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis yakin tanpa nikmat yang diberikan, penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Di samping itu, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga berdasarkan bantuan tersebut penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini yakni antara lain;

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, S.H., M.H., M.M. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan inspirasi, support serta bimbingan kepada penulis dalam mengarahkan penulisan Tesis ini. Banyak masukan yang beliau berikan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Beliau tidak monoton memberikan arahan dengan artian beliau tidak hanya memberikan masukan yang hanya berkaitan dengan materi tesis penulis ini saja. Akan tetapi, beliau juga memberikan nasihat kepada penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dan tidak mungkin pula penulis dapat lupakan sampai akhir hayat penulis nanti. Tak lupa atas motivasi dan dukungan beliau serta waktu yang diberikan dengan kesabaran membimbing penulis sampai selesainya penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan support serta bimbingan kepada penulis dalam mengarahkan penulisan Tesis ini yang telah banyak memberikan pengetahuan ilmu hukum pada penulis baik sebelum penulisan tesis ini maupun pada saat penulisan tesis ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan, semua dedikasinya dalam memberikan bahan-bahan kuliah terhadap penulis selama penulis menimba ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis berjanji akan mengamalkan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan serta akan menjunjung tinggi Hukum.
6. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum serta Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, khususnya staf Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
7. Semua teman-teman angkatan 23 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, terimakasih penulis ucapkan atas kebersamaannya selama ini, semoga pertemanan yang kita bina selama ini terus terjaga sampai akhir hayat kita nanti.

Semoga dapat menjadi amal kebaikan bagi semua. Akhir kata, penulis yakin tulisan penulis ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Namun, walaupun karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, penulis sangat berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi seluruh pembaca khusus bagi penulis.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Perumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	8

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	9
1.5.1 Kerangka Teori	9
1.5.1.1 Teori Legalitas	9
1.5.1.2 Teori Pidana	10
1.5.2 Kerangka Konseptual	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran	13
1.6. Metode Penulisan.....	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Airsoft Gun.....	27
2.2.1. Sejarah Perkembangan Airsoft Gun.....	27
2.2.2. Airsoft Gun di Indonesia.....	31
2.2.3. Jenis Airsoft Gun.....	33
2.2.4. Mekanisme Kerja Airsoft Gun.....	41
2.3. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.....	44
2.3.1. Tinjauan Tentang Implementasi.....	44
2.3.2. Tinjauan Yuridis Kepemilikan dan Penggunaan Senjata	

Replika Airsoft Gun.....	49
2.3.2.1 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951	49
2.3.2.2 Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 ...	50
2.3.2.3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun Dan Paintball	53
BAB III PENGATURAN KEPEMILIKAN SENJATA REPLIKA AIRSOFT GUN	56
3.1. Proses Perijinan Kepemilikan Airsoft Gun	56
3.2. Kasus Penyalahgunaan Senjata Replika Airsoft Gun	58
3.2.1 Beberapa putusan <i>inkrah</i> Pengadilan Terkait Penyalahgunaan Airsoft Gun	61
BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 TERHADAP SEMAKIN MARAKNYA KASUS KEPEMILIKAN ILLEGAL SENJATA REPLIKA AIRSOFT GUN	72
4.1 Semakin Maraknya Kasus Kepemilikan Illegal Senjata Replika Airsoft Gun	72
4.2 Implementasi Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Terhadap Kasus Kepemilikan Illegal Senjata Replika Airsoft Gun	80
4.2.1 Analisis Putusan	82

4.2.1.1	Putusan Nomor: 332/PID.SUS/2020/PT DKI	82
4.2.1.2	Putusan Nomor : 1142/Pid.B/2017/PN Bks	86
BAB V PENUTUP		95
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

